

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan sumber daya manusia merupakan permasalahan yang kompleks, meliputi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lainnya. Berbagai permasalahan yang terjadi pada sumber daya manusia di Indonesia berdampak pada bagaimana perkembangan suatu negara. Salah satu penentu kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari bagaimana kualitas sumber daya manusianya karena sebaik dan sekuat apapun infrastruktur yang dimiliki oleh negara apabila tidak memiliki sumber daya yang berkompeten maka akan sulit untuk berkompetisi dalam persaingan global. Aspek kesehatan menjadi salah satu indikator untuk melihat bagaimana kualitas sumber daya manusia yang ada di suatu negara.

Stunting merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang masih menjadi tantangan bagi negara-negara di seluruh dunia. World Health Organization (WHO) mendefinisikan stunting sebagai suatu gangguan perkembangan yang dialami oleh anak-anak. Penyebab utama dari kondisi ini meliputi malnutrisi yang berkepanjangan, infeksi yang terjadi secara berulang, serta kurangnya stimulasi psikososial yang memadai. Stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik, tetapi juga mempengaruhi perkembangan kognitif anak (Wagino, 2022). Data WHO menyebutkan bahwa terdapat 178 juta balita menderita stunting. Benua Asia memiliki persentase balita stunting tertinggi ke-2 di dunia yaitu mencapai 36%. Dengan tingginya kasus tersebut secara global, maka kasus stunting menjadi salah satu permasalahan krusial yang harus ditangani secara tepat.

Stunting adalah kondisi di mana tinggi badan anak berada di bawah tinggi yang seharusnya sesuai dengan usianya. Gangguan ini terjadi akibat malnutrisi yang berkepanjangan dan dapat disebabkan oleh kekurangan asupan gizi serta infeksi kronis atau berulang. Stunting dapat diukur dengan menggunakan nilai *Z score* tinggi badan menurut usia (TB/U), dimana nilai tersebut kurang dari -2 standar deviasi (Andika & Rahmi, 2022). Penyebab stunting melibatkan berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Masalah ini sering kali muncul pada anak-anak di bawah usia dua tahun, di mana periode tersebut sangat krusial untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Dalam rentang waktu ini, asupan gizi yang memadai menjadi sangat penting untuk mendukung kesehatan anak. Selain itu, faktor-faktor seperti pendapatan keluarga juga berkontribusi terhadap risiko stunting. Pengetahuan gizi yang dimiliki oleh ibu balita memainkan peran penting dalam menentukan kualitas makanan yang diberikan. Ketahanan pangan keluarga dan tingkat pendidikan ibu juga berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam menyediakan gizi yang baik. Tak kalah penting, riwayat penyakit infeksi pada balita serta aspek sosial budaya di lingkungan mereka turut memengaruhi kejadian stunting (Anwar, et al., 2022).

Stunting memiliki dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Ketika seorang anak mengalami stunting, berbagai aspek dari tumbuh kembangnya akan terpengaruh, termasuk pertumbuhan berat dan tinggi badan. Selain itu, perkembangan kognitif, motorik kasar dan halus, serta kemampuan berbicara juga akan terhambat. Aspek sosial dan emosional anak pun tidak luput dari dampak negatif stunting. Jika masalah ini terjadi selama masa

golden period, yaitu periode kritis dalam perkembangan anak, maka konsekuensinya bisa sangat serius. Tumbuh kembang yang tidak optimal pada masa ini sulit untuk diperbaiki ketika anak tersebut mencapai usia dewasa. Oleh karena itu, stunting tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas bagi masa depan bangsa. Penanganan yang tepat dan segera sangat diperlukan untuk mencegah stunting dan memastikan generasi yang sehat dan produktif (Laily & Indarjo, 2023). Dampak jangka panjang dari stunting dapat mengakibatkan penurunan kemampuan kognitif dan prestasi akademik, serta melemahnya sistem kekebalan tubuh dan kapasitas kerja. Selain itu, stunting juga berisiko meningkatkan kemungkinan terjadinya berbagai penyakit, termasuk penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes, kanker, serta disabilitas pada usia lanjut. (Prendergast & Humphrey, 2014).

Stunting menjadi permasalahan yang mengganggu kualitas pertumbuhan anak di Indonesia. Langkah awal untuk mencetak kualitas pertumbuhan anak yang baik dilakukan melalui upaya pemenuhan gizi pada anak sejak usia dini. Masalah gizi di Indonesia tergolong serius, terlihat dari tingginya angka kasus gizi kurang pada anak-anak balita. Kondisi ini mempengaruhi anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang berada dalam usia pra-sekolah. Permasalahan gizi ini berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan, dimana banyak ditemukan tingginya angka absensi dan angka putus sekolah. Ketika kualitas kesehatan sekaligus kualitas pendidikan generasi penerus bangsa rendah, maka akan berdampak pada kemajuan dan perkembangan Indonesia yang memprihatinkan di masa mendatang. Situasi ini menjadikan stunting sebagai salah satu prioritas utama dalam upaya perbaikan gizi

global hingga tahun 2025. Penanganan stunting dianggap krusial untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup anak-anak di seluruh dunia.

Stunting menjadi salah satu target *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang termasuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan ke-2 yaitu Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan. Dalam tujuan tersebut, terdapat target dari SDGs yang bertujuan untuk mengakhiri semua bentuk malnutrisi. Rincian dari target ini mencakup upaya untuk menghapus segala bentuk kekurangan gizi pada tahun 2030, serta mencapai target internasional yang telah disepakati untuk anak-anak yang mengalami stunting dan *underweight* di bawah usia 5 tahun pada tahun 2025. Selain itu, target ini juga mencakup pemenuhan kebutuhan gizi bagi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta lansia.



Gambar 1.1 *Sustainable Development Goals*
Sumber : (Social Investmen Indonesia, 2018)

Indonesia merupakan salah satu negara yang menghadapi tingkat prevalensi stunting yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya. Apabila masalah ini tidak segera ditangani, dampaknya akan sangat merugikan bagi kinerja pembangunan nasional, yang mencakup aspek-aspek penting seperti pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan sosial. Anak-anak yang terlahir dalam keadaan sehat dan tumbuh dengan baik, serta mendapatkan dukungan pendidikan yang berkualitas, memiliki potensi untuk menjadi generasi penerus yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan stunting sangat penting untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat berperan aktif dalam kemajuan Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. Sementara anak yang bergejala stunting diprediksi meraih pendapatan 20% lebih rendah di usia kerja yang dapat mengakibatkan parahnya angka kemiskinan serta mengancam kelangsungan hidup generasi yang akan datang (Nisa, 2018).

Berdasarkan data dari *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2020, Indonesia menempati urutan kedua tertinggi di Asia Tenggara untuk prevalensi stunting pada anak balita, dengan angka mencapai 31,8%. Di kawasan ini, Timor Leste mencatatkan prevalensi stunting tertinggi, yaitu 48,8%, diikuti oleh Laos dengan 30,2% di posisi ketiga, dan Kamboja di posisi keempat dengan 29,9%. Sebaliknya, Singapura memiliki prevalensi stunting terendah di kawasan tersebut, hanya sebesar 2,8%. (Databoks, 2021). Di Indonesia, prevalensi stunting menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun, meningkat antara 2010 hingga 2013,

kemudian mengalami penurunan pada periode 2014 hingga 2018. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2021 menunjukkan penurunan prevalensi sebesar 3,3% menjadi 24,4%, dan pada tahun 2022, angka tersebut turun lagi menjadi 21,6%. (BRIN, 2023). Dari penurunan prevalensi stunting tersebut menunjukkan bahwa terdapat keberhasilan program intervensi stunting baik intervensi sensitif dan spesifik. Namun masih perlu adanya upaya yang lebih keras untuk mencapai target nasional 14% pada 2024.

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting yang memiliki tujuan untuk mencapai target angka stunting Indonesia di angka 14%. Pada peraturan tersebut, dijelaskan mengenai tujuan strategi nasional percepatan stunting, yaitu :

- a. Mengurangi tingkat prevalensi stunting;
- b. Meningkatkan kualitas persiapan kehidupan keluarga;
- c. Memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi;
- d. Meningkatkan pola pengasuhan;
- e. Meningkatkan akses serta kualitas layanan kesehatan; dan
- f. Meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi.

Selanjutnya, pelaksanaan percepatan penurunan stunting ditujukan kepada beberapa kelompok sasaran yang spesifik. Kelompok tersebut meliputi remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak berusia 0-59 bulan. Dengan menargetkan kelompok-kelompok ini, diharapkan intervensi yang dilakukan dapat lebih efektif dalam mengurangi angka stunting.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun 2019-2023, dengan data sebagai berikut :

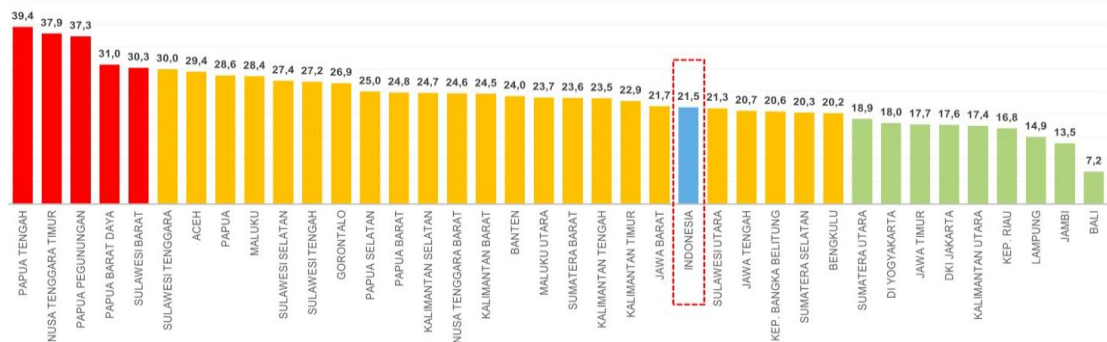
Tabel 1.1 Persentase Stunting di Indonesia 2019-2023

Tahun	Persentase (%)
2019	27,7
2021	24,4
2022	21,6
2023	21,5

Sumber : SSGBI 2019, SSGI 2022, SKI 2023

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia terus menurun dari tahun ke tahun. Namun, angka stunting masih tergolong tinggi dan jauh dari target nasional yaitu sebesar 14%. Pada 2023 kasus stunting berada pada angka 21,5%, dengan data perprovinsi sebagai berikut :

Gambar 1.2 Sebaran Prevalensi Balita Stunting Per Provinsi Tahun 2023



Sumber : (SKI, 2023)

Grafik di atas menunjukkan prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2023. Dari data SKI 2023, sembilan provinsi tercatat memiliki prevalensi di bawah 20%. Salah satu provinsi, Bali, bahkan mencatat prevalensi yang sangat rendah, yaitu 7,2%. Namun, masih ada lima provinsi yang prevalensinya di atas 30%. Provinsi Papua Tengah mencatat angka tertinggi dengan 39,4%. Nusa Tenggara Timur dan Papua Pegunungan juga memiliki prevalensi yang signifikan, masing-masing 37,9% dan 37,3%. Selain itu, Papua Barat Daya dan Sulawesi Barat juga menunjukkan angka di atas 30%. Hal tersebut menunjukkan masih buruknya kecukupan nutrisi dan gizi pada anak di Indonesia. Provinsi Jawa Tengah berada pada urutan ke 25 secara nasional dengan prevalensi 20,7 %, dimana angka tersebut masih jauh dari target nasional sebesar 14%.

Tabel 1.2 Prevalensi Stunting Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Tahun	Stunting	Sumber
2018	31,2%	Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)
2019	27,68%	Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI telah terintegrasi dengan riskesdas)
2020	-	Tidak dilakukan pengukuran karena pandemi
2021	20,9%	Survey Status Gizi Indonesia

Sumber : RPD Jateng 2024-2026

Data yang tersaji pada tabel menunjukkan angka stunting di Provinsi Jawa Tengah yang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Namun demikian, angka ini masih tergolong tinggi yaitu sebesar 20,9% dibandingkan dengan target nasional untuk 2024 yaitu mencapai 14%. Jika merujuk pada pedoman WHO dengan ambang batas prevalensi stunting pada 20%, Jawa Tengah pun belum mencapai target yang ditetapkan. Pemerintah Jawa Tengah bertekad untuk mengurangi angka stunting hingga minimal 14%, sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Mengacu pada target nasional, diperlukan upaya untuk menurunkan prevalensi stunting di Jawa Tengah menjadi di bawah 16% pada tahun 2023. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menangani masalah gizi dan kesehatan anak.

Tabel 1.3 Prevalensi Balita Stunting Berdasarkan Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten / Kota	Prevalensi (%)	Kategori
1	Wonosobo	29,2	KURANG
2	Pekalongan	28,6	KURANG
3	Kota Pekalongan	28,2	KURANG
4	Purbalingga	26,0	KURANG
5	Magelang	25,8	KURANG
6	Temanggung	25,1	KURANG
7	Batang	24,7	SEDANG
8	Klaten	24,5	SEDANG
9	Sukoharjo	24,3	SEDANG
10	Kendal	22,4	SEDANG
11	Kota Tegal	22,3	SEDANG
12	Karangayar	22,2	SEDANG
13	Kebumen	21,9	SEDANG
14	Brebes	21,6	SEDANG
15	Tegal	21,5	SEDANG
16	Boyolali	21,5	SEDANG
17	Blora	21,2	SEDANG
18	Banyumas	20,9	SEDANG
19	Purworejo	20,6	SEDANG

20	Grobogan	20,2	SEDANG
21	Banjarnegara	19,9	BAIK
22	Wonogiri	19,5	BAIK
23	Rembang	19,5	BAIK
24	Jepara	18,9	BAIK
25	Semarang	18,8	BAIK
26	Cilacap	18,5	BAIK
27	Pati	18,5	BAIK
28	Sragen	18,4	BAIK
29	Kota Salatiga	16,9	BAIK
30	Kota Surakarta	16,0	BAIK
31	Kota Semarang	15,7	BAIK
32	Kudus	15,7	BAIK
33	Kota Magelang	15,4	BAIK
34	Pemalang	15,3	BAIK
35	Demak	9,5	SANGAT BAIK
JAWA TENGAH		20,7	

Sumber : (SKI,2023)

Tabel yang tersaji di atas merupakan kondisi prevalensi stunting tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah yang dikelompokkan berdasarkan kabupaten/kota. Dari data tersebut, daerah dengan prevalensi stunting tertinggi yaitu Kabupaten Wonosobo (29,2%) dan terendah diraih oleh Kabupaten Demak (9,5). Ditinjau dari protokol WHO mengenai ambang batas prevalensi stunting sebesar 20%, maka terdapat 20

kabupaten/kota yang memiliki prevalensi di atas ambang batas dengan kategori prevalensi stunting sedang, salah satunya yaitu Kabupaten Kebumen. Dilihat dari rata-rata prevalensi stunting Provinsi Jawa Tengah (20,7%), Kabupaten Kebumen masih tertinggal, yaitu sebesar 21,9%.

Meninjau lokus penelitian penulis, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mengeluarkan regulasi mengenai penanganan stunting yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting. Pasal 3 menjelaskan bahwa tujuan dari pencegahan dan penanganan stunting adalah untuk meningkatkan komitmen semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan upaya tersebut. Selain itu, pasal ini juga menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi antara berbagai aktor dan sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting. Kabupaten Kebumen tercatat sebagai salah satu daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi di antara kabupaten dan kota lain di Jawa Tengah. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk menjadikan Kabupaten Kebumen sebagai fokus penelitian.

Tabel 1.4 Prevalensi Stunting Kabupaten Kebumen per Kecamatan (2021-2023)

No	Kecamatan	Prevalensi Stunting (%)		
		2021	2022	2023
1	Ayah	7,25	6,29	8,44
2	Buayan	16,04	14,19	10,32
3	Puring	17,47	13,71	13,46
4	Petanahan	14,17	12,16	9,8
5	Klirong	11,50	7,58	9,14
6	Buluspesantren	11,71	7,69	9,1
7	Ambal	11,35	7,81	10,53
8	Mirit	4,94	6,86	10,40
9	Bonorowo	12,42	11,55	11,50
10	Prembun	12,87	13,22	9,42
11	Padureso	6,08	5,38	8,73
12	Kutowinangun	13,85	11,54	8,85
13	Alian	16,07	14,68	9,70
14	Poncowarno	15,47	12,60	11,82
15	Kebumen	11,51	9,56	8,42
16	Pejagoan	15,47	11,00	9,77
17	Sruweng	19,55	11,63	9,76
18	Adimulyo	10,12	10,91	9,82
19	Kuwarasan	13,29	10,27	10,75

20	Rowokele	13,45	10,73	9,60
21	Sempor	11,53	12,22	9,18
22	Gombong	8,98	10,29	9,8
23	Karangayar	6,92	5,95	12,50
24	Karanggayam	13,66	11,45	11,98
25	Sadang	9,67	9,44	10,98
26	Karangsambung	6,16	4,93	6,17
Jumlah		12,3	10,23	9,87

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.

Data yang tersaji menunjukkan prevalensi stunting Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2023 terus mengalami penurunan. Namun, data per kecamatan menunjukkan tren yang naik turun (fluktuatif). Prevalensi stunting di Kabupaten Kebumen kebanyakan berada pada titik tertinggi pada tahun 2021 dengan prevalensi tertinggi pada Kecamatan Sruweng dengan nilai 19,55%. Pada data terbaru yaitu tahun 2023, prevalensi stunting sudah membaik dibuktikan dengan angka rata rata kabupaten yang sudah bisa menekan angka bahkan sampai di bawah 10%. Meskipun demikian, pemerintah harus menciptakan konsistensi dalam penekanan angka stunting di Kabupaten Kebumen.

Melihat angka stunting yang masih tinggi di beberapa kecamatan, pemerintah perlu melakukan upaya penurunan prevalensi stunting dengan memaksimalkan koordinasi dengan tiap kecamatan dan pihak yang terjun langsung ke dalam pelaksanaan program agar angka stunting dapat dikendalikan. Meninjau lokus penelitian di Kecamatan Petanahan, data menunjukkan bahwa Kecamatan

Petanahan dapat menekan angka prevalensi stunting cukup tinggi yaitu tahun 2021 sebesar 14,17% dan pada tahun 2023 dapat mencapai angka 9,8%, dimana angka tersebut di bawah rata-rata stunting di Kabupaten Kebumen (9,87%). Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat keberhasilan dari program-program upaya penurunan prevalensi stunting yang dilaksanakan di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2024 mengenai Pencegahan dan Penanganan Stunting menekankan pentingnya penanganan masalah stunting secara menyeluruh dan kolaboratif oleh pemerintah daerah. Dalam upaya ini, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menciptakan generasi yang sehat dan kompetitif. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan upaya untuk memperkuat kerja sama antara berbagai aktor dan sektor dalam pencegahan serta penanganan stunting. Kolaborasi yang baik akan memastikan bahwa semua pihak berkontribusi secara efektif dalam mengatasi masalah ini. Dengan demikian, diharapkan generasi mendatang dapat tumbuh dengan baik dan memiliki daya saing yang tinggi.

Keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh peran pemerintah semata. Sebaliknya, banyak pemangku kepentingan lain yang harus dilibatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Sektor swasta, misalnya, dapat memberikan dukungan finansial dan inovasi yang diperlukan. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam memberikan masukan dan umpan balik yang konstruktif. Akademisi dapat berkontribusi melalui penelitian dan analisis yang mendalam untuk mendukung pengambilan keputusan. Media berfungsi sebagai

jembatan informasi, membantu menyebarluaskan pesan dan meningkatkan kesadaran publik. Terakhir, organisasi masyarakat dapat berperan dalam mobilisasi dan pengorganisasian komunitas untuk memastikan partisipasi yang luas. Konsep ini dikenal sebagai tata kelola kolaboratif, yang merupakan sistem pengelolaan masalah yang secara langsung melibatkan pemangku kepentingan di luar pemerintah. Pendekatan ini berfokus pada pencapaian konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif. Tujuan dari tata kelola kolaboratif adalah untuk melaksanakan kebijakan dan program publik dengan lebih efektif. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan solusi yang dihasilkan lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kolaborasi ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan sangat penting untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan program. (Ansel dan Gash, dalam Astuti et al, 2020).

Dinamika kolaborasi merujuk pada perubahan yang terjadi selama proses kolaborasi yang dapat memengaruhi semua aktor dan lingkungan sekitarnya. Menurut Emerson dalam (Astuti, et al., 2020) konsep dinamika kolaborasi mencakup penggerakan prinsip bersama, motivasi kolektif, dan kapasitas untuk melakukan tindakan secara bersama-sama. Konsep ini diterapkan dalam penelitian ini untuk menganalisis dinamika program tata kelola kolaboratif Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) dalam upaya menurunkan prevalensi stunting di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Meninjau lokus penelitian, penulis terfokus pada salah satu desa di Kecamatan Petanahan yaitu Desa Ampelsari. Desa Ampelsari

menjadi *pilot project* dari pelaksanaan Program DASHAT karena masuk dalam nominasi Kampung KB terbaik di Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada April 2023, faktor utama penyebab stunting pada anak adalah konsumsi makanan yang tidak bergizi, yang berkontribusi sebesar 32,4%. Selain itu, kekurangan gizi pada ibu selama masa kehamilan menjadi penyebab terbesar kedua, dengan kontribusi sebesar 28,2%. Hal ini menunjukkan bahwa pola makan yang tidak memadai dan asupan gizi yang kurang selama kehamilan sangat mempengaruhi pertumbuhan anak. Oleh karena itu, perhatian terhadap gizi ibu hamil dan anak sangat penting untuk mencegah stunting. Upaya untuk meningkatkan kualitas gizi di masyarakat perlu dilakukan agar generasi mendatang dapat tumbuh dengan sehat (Detik.com, 2023). Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mengambil langkah-langkah konkret dalam menangani masalah stunting. Upaya tersebut mencakup pemberian makanan tambahan serta berbagai bentuk bantuan lainnya yang bersifat mendukung. Melalui inisiatif ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak di wilayahnya.

Salah satu langkah intervensi untuk mengatasi stunting adalah dengan memberikan makanan bergizi seimbang kepada keluarga yang berisiko mengalami stunting. Hal ini dilakukan melalui pemanfaatan bahan pangan lokal yang dioptimalkan, serta melibatkan kontribusi dari mitra lain dalam program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT). Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat meningkatkan asupan gizi dan mengurangi risiko stunting di masyarakat. Program DASHAT dilaksanakan oleh pemerintah desa atau kelurahan. Dalam

pelaksanaannya, mereka mengembangkan kelompok atau lembaga lokal yang relevan. Pengembangan ini disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan dalam penanganan stunting di tingkat desa dan sekitarnya. Program DASHAT dilaksanakan dengan melibatkan beberapa pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, kader penggerak, dan masyarakat. Program ini diharapkan dapat berperan signifikan dalam turunnya prevalensi stunting di Kabupaten Kebumen.

Namun, dalam pelaksanaan kolaborasinya, terdapat kekurangan yaitu pada tidak adanya keterlibatan dari pihak swasta dalam kolaborasi serta kurangnya tenaga ahli gizi di Puskesmas Petanahan. Berdasarkan pemaparan di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Dinamika Kolaborasi dalam Program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) untuk Menurunkan Prevalensi Stunting di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika kolaborasi dalam Program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) untuk menurunkan prevalensi stunting di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen?
2. Apa faktor pendorong dinamika kolaborasi dalam Program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) untuk menurunkan prevalensi stunting di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dinamika kolaborasi dalam Program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) dalam menurunkan prevalensi stunting di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen
2. Menganalisis faktor pendorong dinamika kolaborasi dalam Program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) dalam menurunkan prevalensi stunting di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia akademik, khususnya dalam topik kolaborasi pemerintahan yang berkontribusi untuk karya tulis ilmiah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan peneliti bagi seluruh pihak terkait dengan penelitian ini yaitu :

1) Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan dan pemahaman mengenai hal yang didapatkan di lapangan khususnya terkait kolaborasi penanganan stunting.

2) Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan masukan bagi instansi terkait agar dinamika kolaborasi yang terjalin

dapat berjalan dengan maksimal dan berdampak positif sebagai upaya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Kebumen.

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi ilmiah serta kontribusi wawasan untuk masyarakat terkait kolaborasi beberapa pihak dalam penurunan prevalensi stunting di Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dikaji pada penelitian difokuskan terhadap penelitian mengenai *collaborative governance*, diantaranya yaitu :

Ramadhanty, T.F dkk membahas mengenai dinamika kolaborasi dalam tata Kelola Layanan Terpadu Satu Atap untuk Pekerja Migran Kabupaten Cirebon Jawa Barat dengan menggunakan indikator yang disampaikan oleh Emerson dan Nabatchi (2015). Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Dengan Dinamika kolaborasi dalam tata kelola Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk pekerja migran di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sebagian besar indikator yang berkaitan dengan pemenuhan prinsip dan tujuan kolaborasi telah tercapai, termasuk motivasi bersama di antara para pemangku kepentingan. Selain itu, kapasitas para aktor yang terlibat juga telah berkembang, memungkinkan mereka untuk melaksanakan tindakan yang efektif dalam mendukung pekerja migran (Rahayu & Ramadhanty,

2023).

Ahmad Saufi dalam penelitiannya membahas mengenai dinamika *collaborative governance* dalam penanggulangan stunting di tengah pandemik Covid-19. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan berdasar pada teori *Collaborative Governance* menurut Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012) dan indikator keberhasilan kolaborasi menurut Whitaker. Hasil penelitiannya yaitu dinamika *collaborative governance* dalam penanggulangan stunting di Provinsi Jawa Timur terdapat kesenjangan yaitu pada dominasi peran pemerintah dibandingkan dengan aktor lainnya, serta lambannya proses transformasi kebijakan yang ada di rencana aksi daerah. Kesenjangan tersebut terlihat dari indikator keberhasilan kolaborasi, di mana kesepakatan antar institusi masih terbatas pada komitmen bersama tanpa adanya elaborasi yang mendalam mengenai dukungan masing-masing pemangku kepentingan dan hasil kinerja mereka. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada pemahaman yang jelas tentang peran dan kontribusi setiap stakeholder dalam kolaborasi tersebut. (Saufi, 2021).

Sejalan dengan penelitian di atas, Candranegara dkk membahas mengenai pengembangan wisata dengan kolaborasi model pentahelix di Ekowisata D'Bendungan View Telaga Tunjung. Dalam pengelolaannya, terdapat beberapa masalah terkait kurangnya sinergi antara pemerintah, desa, dan investor untuk mewujudkan desa wisata yang berkelanjutan dan konsisten. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif untuk menggali informasi yang mendalam. Temuan menunjukkan bahwa masyarakat desa

setempat, diwakili oleh Paiketan Krama Rantauan Timpag (PAKERTI), mampu mengidentifikasi dan mengeksplorasi potensi yang ada untuk pengembangan ekowisata. Selain itu, pemerintah, melalui Dinas Pariwisata, telah menjalin kerjasama yang produktif dengan pengelola D'Bendungan View untuk merumuskan manajemen pengelolaan yang efektif (Candranegara, et al., 2019)

Bing Ran dan Huiting Qi dalam artikelnya yang berjudul *Contingencies of Power Sharing in Collaborative Governance* membahas mengenai pembagian kekuasaan dalam *collaborative governance*. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Artikel ini mengungkapkan bahwa terdapat kemungkinan tertentu yang mempengaruhi hubungan antara pembagian kekuasaan dan efektivitas tata kelola kolaboratif (Ran & Qi, 2018).

Selanjutnya, Kurniasih dkk membahas tentang *collaborative governance* dalam percepatan pencegahan stunting di kabupaten temanggung. Kabupaten Temanggung menjadi salah satu kabupaten yang memerlukan penanganan stunting dengan *collaborative governance* dengan melibatkan pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, swasta dan pihak berkepentingan lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan dengan berdasar pada indikator dari middle teori ansell and gash (2007). Dimana hasil sementara yang didapatkan terjadi penurunan angka stunting pada hasil penimbangan serentak pada bulan februari 2022 yaitu sebanyak 2,9% dan komitmen antar

anggota konvergensi (Kurniasih & Suwitri, 2023).

Selanjutnya, Ipan dkk melakukan penelitian yang berfokus pada pelaksanaan proses kolaborasi dalam penanganan stunting di UPTD Puskesmas Ciampe. Mereka menggunakan teori collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008) sebagai kerangka acuan. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yang memungkinkan analisis mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi dalam penanganan stunting di UPTD Puskesmas Ciampe telah berjalan dengan baik. Keberhasilan ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi yang signifikan dari sektor swasta dan masyarakat dalam upaya tersebut. Meskipun partisipasi masyarakat belum sepenuhnya aktif, mereka tetap memberikan respons positif terhadap program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Keterlibatan sektor swasta juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya ini. Masyarakat menunjukkan sikap terbuka terhadap inisiatif yang diambil. Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan, kolaborasi ini menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. (Ipan, et al., 2021).

Yunifar dkk penelitian mereka membahas tentang Tata Kelola Kolaboratif dalam penerapan Peraturan Wali Kota No. 79 Tahun 2022 mengenai percepatan penurunan stunting di Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara Pemerintah, sektor Swasta, Media Massa, LSM, dan Akademisi telah berjalan dengan baik, dengan komunikasi yang terjalin secara efektif. Selain itu, hasil dari kolaborasi ini

berkontribusi pada penurunan prevalensi stunting. Namun, terdapat hambatan dalam penanggulangan stunting yang disebabkan oleh tingginya mobilitas penduduk di Kota Surabaya. (Yunifar, et al., 2022).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan Dhiya, mereka mengkaji efektivitas penerapan tata kelola kolaboratif di kalangan orang tua yang terlibat di Posyandu Puskesmas yang terletak di Sawah Baru, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta praktik pencegahan stunting. Peneliti menggunakan indikator yang merujuk pada proses Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash pada tahun 2008, serta menerapkan metode kualitatif dalam pengumpulan dan analisis data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kolaborasi di Posyandu tersebut telah berjalan dengan baik dan optimal, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap upaya pencegahan stunting di wilayah tersebut. (Ahmad S., Dhiya U, 2022).

Prendergast, A.J., dan Humprey, J.H., dalam studinya membahas tentang faktor penyebab stunting di negara berkembang. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan faktor-faktor penyebab stunting dari negara-negara lain. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan stunting akan menurun seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan, peningkatan urbanisasi, peningkatan pendidikan perempuan, penurunan angka kesuburan, peningkatan WASH dan reformasi layanan kesehatan

(Prendergast, A.J., & Humprey, J.H., 2014).

Martomo, Y. P., dan Khairul, K dalam studinya membahas mengenai pelaksanaan *collaborative governance* dari perspektif civil society pada pengelolaan Pasar Klewer pasca kebakaran. Metode yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menjadi bagian dari kolaborasi melalui perhimpunan pedagang. Masyarakat di sekitar Pasar Klewer berperan aktif dalam memastikan kelancaran operasional pasar dengan cara menjaga dan merawat kebersihan, keamanan, serta ketertiban di area tersebut. Mereka juga bersiap dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran pasar yang mungkin terjadi lagi di masa depan. Dengan partisipasi ini, diharapkan kondisi pasar tetap aman dan nyaman bagi semua pengunjung dan pedagang. (Martomo, Y. P., & Khairul, K., 2021).

Dari hasil *literatur review*, kebaharuan penelitian ini terletak pada teori dan program yang dianalisis. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana dinamika kolaborasi dalam Program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kabupaten Kebumen menggunakan teori dari Emerson, Nabatchi dan Balogh (2012) yaitu meliputi : 1) Penggerakan Prinsip Bersama; 2) Motivasi Bersama; dan 3) Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama.

1.5.2 Administrasi Publik

Perkembangan zaman membuat tuntutan akan kebutuhan semakin meningkat. Kebutuhan semakin meningkat ini diwarnai dengan sulitnya memenuhi kebutuhan tersebut karena sumber daya yang terbatas. Dengan adanya hal ini menjadikan manusia termotivasi untuk melakukan kerjasama demi memenuhi kebutuhannya. Dengan kerjasama, individu, kelompok, bahkan sebuah negara pun dapat dengan mudah bekerja sama untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam mencapai kebutuhan tentunya terdapat persyaratan yang harus dilakukan, seperti sistem administrasi. Administrasi diartikan sebagai manajemen kerjasama untuk mencapai tujuan. Pemerintah sebagai aktor yang berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat membutuhkan sistem administrasi yang biasa disebut dengan administrasi negara dan di mana sekarang digantikan dengan administrasi publik karena dalam hal ini administrasi bertujuan untuk melakukan pelayanan publik.

Secara etimologis, kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua bagian, yaitu "Ad" dan "Ministrare." Istilah ini memiliki makna yang berkaitan dengan tindakan membantu, melayani, atau memenuhi kebutuhan. Selain itu, kata "administration" juga mencakup konsep pemberian bantuan. Dalam konteks ini, administrasi mencakup aspek pemeliharaan dan pengelolaan. Dengan demikian, administrasi dapat dipahami sebagai suatu proses yang bertujuan untuk mendukung dan mengelola berbagai kegiatan secara efektif. Terdapat berbagai definisi administrasi publik yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Definisi pertama

tentang administrasi publik merupakan definisi yang diungkapkan oleh Woodrow Wilson dalam Tjiptoherijanto & Manurung (2017) yang menjelaskan bahwa administrasi publik adalah “... *as the detailed and systems of public law*”. Definisi yang diajukan tersebut sangat menonjolkan pada sisi politis dan keformalan dari administrasi publik.

Dimock, Dimock, dan Fox berpendapat bahwa administrasi publik adalah proses yang menghasilkan barang dan jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai konsumen. Dalam pandangan ini, administrasi publik dianggap sebagai aktivitas ekonomi yang sebanding dengan dunia bisnis. Namun, terdapat perbedaan mendasar, yaitu administrasi publik memiliki fokus yang lebih khusus pada penyediaan barang dan layanan untuk kepentingan umum. Dengan demikian, tujuan utama dari administrasi publik adalah untuk melayani masyarakat. Proses ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, administrasi publik memainkan peran penting dalam menciptakan dan menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Barton dan Chappel mendefinisikan administrasi publik sebagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam definisi ini, mereka menekankan pentingnya peran staf dalam menyampaikan layanan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi publik tidak hanya berfokus pada pembuatan kebijakan, tetapi juga pada pelaksanaan layanan yang efektif.

Dengan demikian, keberhasilan administrasi publik sangat bergantung pada kemampuan staf untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Sementara itu, Starling mengartikan administrasi publik sebagai semua hal yang berada dalam cakupan pemerintah atau yang dilaksanakan berdasarkan janji-janji yang dibuat selama kampanye pemilihan. Definisi ini menekankan pentingnya keterkaitan antara tindakan pemerintah dan komitmen yang disampaikan kepada masyarakat. Dengan demikian, administrasi publik berfungsi untuk merealisasikan harapan pemilih melalui implementasi kebijakan yang konsisten. Dengan demikian, definisi ini menyoroti batasan yang menekankan pada sisi pencapaian pemerintah dan pemilihan kebijakan publik.

Nigro dan Nigro mengemukakan bahwa administrasi publik merupakan upaya yang dilakukan secara kolaboratif oleh sekelompok individu dalam ranah publik. Proses ini melibatkan tiga cabang pemerintahan, yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Administrasi publik memainkan peran krusial dalam merumuskan kebijakan publik. Dengan demikian, administrasi publik menjadi bagian integral dari proses politik. Hal ini berbeda secara signifikan dari pendekatan yang diterapkan dalam administrasi swasta. Oleh karena itu, administrasi publik memiliki karakteristik dan tujuan yang unik dalam melayani kepentingan masyarakat. Di samping itu, administrasi publik memiliki keterkaitan yang kuat dengan berbagai entitas swasta dan individu dalam upaya memberikan layanan kepada masyarakat. Definisi ini lebih menyoroti aspek proses institusional,

yang menunjukkan bahwa kolaborasi antar kelompok dalam konteks publik memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan kegiatan di sektor swasta. Seperti yang diungkapkan oleh Dwight Waldo (dalam Ghoni, 2020), administrasi publik dapat dipahami sebagai pengelolaan dan pengorganisasian sumber daya manusia serta alat-alatnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa administrasi publik adalah kegiatan kerjasama yang dijalankan oleh pemerintah atau organisasi publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan permasalahan masyarakat guna kepentingan bersama.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Administrasi publik dianggap sebagai ilmu yang terus mengalami perubahan dan perbaikan seiring dengan waktu, menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang ada. Terdapat beberapa paradigma administrasi publik, yaitu :

Paradigma 1 Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926). Paradigma ini mengusulkan pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga bagian, yaitu fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Paradigma kedua dalam Prinsip-Prinsip Administrasi Negara yang berlangsung antara tahun 1927 hingga 1937 memperkenalkan konsep penting mengenai prinsip administrasi sebagai fokus utama dalam administrasi publik. Dalam paradigma ini, terdapat tujuh prinsip yang

dikenal dengan istilah POSDCORB, yang merupakan akronim dari *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Staffing* (Pengisian Personel), *Directing* (Pengarahan), *Coordinating* (Koordinasi), *Reporting* (Pelaporan), dan *Budgeting* (Penganggaran). Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memberikan kerangka kerja yang sistematis dalam pengelolaan organisasi, sehingga dapat diterapkan secara universal di berbagai jenis organisasi dan dalam berbagai konteks budaya. Dengan demikian, paradigma ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan bagi para pengelola administrasi publik, tetapi juga memberikan landasan bagi pengembangan praktik administrasi yang lebih efisien dan efektif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan organisasi dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan mereka dan sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik yang disediakan untuk masyarakat.

Paradigma 3 Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970). Dalam paradigma 3 administrasi publik fokus kembali pada induk ilmunya, yaitu ilmu politik. Hal ini menyebabkan perubahan pada lokus yaitu birokrasi pemerintahan, namun dengan konsekuensi kehilangan fokus yang jelas. Pada tahapan ini, terdapat upaya untuk menentukan definisi yang tepat mengenai hubungan konseptual antara administrasi negara dan politik.

Paradigma 4 Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970). Fokus dalam paradigma ini yaitu teori perilaku organisasi, kebijakan publik dan teknologi manajemen. Ada dua jalur perkembangan yang sedang berlangsung dalam bidang administrasi, yang pertama berfokus pada

pengembangan ilmu administrasi murni yang didukung oleh disiplin psikologi sosial, sementara yang kedua lebih mengarah pada kebijakan publik. Setiap fokus yang dihasilkan dari kedua jalur ini dianggap memiliki potensi untuk diterapkan secara universal di berbagai konteks dan situasi. Namun, kondisi ini menyebabkan ketidakjelasan mengenai titik fokus atau lokus dari perkembangan tersebut, sehingga sulit untuk menentukan arah yang jelas dalam penerapan prinsip-prinsip yang telah dikembangkan.

Paradigma 5 Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-1990) menandai periode di mana administrasi publik memiliki fokus dan lokasi yang lebih terdefinisi. Dalam paradigma ini, perhatian utama administrasi publik terletak pada teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik. Sementara itu, lokasi atau konteksnya berfokus pada masalah dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, paradigma ini menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap dinamika publik. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi publik berperan penting dalam menangani isu-isu yang relevan bagi masyarakat.

Paradigma 6 Administrasi Publik sebagai *Governance* (1990-sekarang). Paradigma ini merupakan paradigma baru dalam pengelolaan pemerintahan. Dalam paradigma ini, terdapat tiga pilar utama yang saling berinteraksi, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam konteks *governance*, administrasi publik menekankan pentingnya kolaborasi yang setara dan seimbang antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam pemenuhan kebutuhan publik dan penyelesaian

masalah-masalah publik. Seiring dengan perubahan paradigma yang terjadi, muncul sudut pandang baru dalam bidang administrasi publik yaitu *good governance*.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma terakhir yaitu *governance*. Paradigma *governance* memiliki pandangan baru yaitu tata kelola pemerintahan yang baik, hal ini berkaitan dengan *collaborative governance* yang mencoba untuk menyelesaikan permasalahan publik melalui kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan pemerintah.

1.5.4 Manajemen Publik

Manajemen publik dapat dipahami sebagai suatu disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner, yang mencakup berbagai aspek umum dari organisasi, dan merupakan kombinasi antara fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian di satu sisi, serta pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan politik di sisi lainnya. Menurut Shafritz dan Russel, seperti yang dikutip dalam karya Keban (2008:93), Manajemen publik dapat dipahami sebagai usaha individu untuk mengambil tanggung jawab dalam mengelola suatu organisasi. Proses ini melibatkan pemanfaatan sumber daya yang ada, termasuk tenaga kerja dan peralatan, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, manajemen publik tidak hanya terbatas pada aspek administratif. Sebaliknya, ia juga mencakup pengelolaan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Dengan pendekatan ini, manajemen publik berfokus pada pencapaian hasil yang diinginkan oleh organisasi.

Woodrow Wilson, dalam karya “*The Study of Administration*” tahun 1887, dianggap sebagai pelopor dalam bidang manajemen. Teori manajemen publik terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Terdapat beberapa paradigma yang terjadi dalam manajemen publik, yaitu berawal dari pendekatan ***Old Public Administration***, yang menjelaskan bahwa manajemen publik melibatkan kajian lintas disiplin mengenai struktur organisasi, dengan menggabungkan elemen-elemen manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian, serta aspek-aspek sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan politik.

Paradigma kedua, yaitu ***New Public Manajement (NPM)***, yang menerapkan sistem manajemen yang terdesentralisasi menggunakan alat-alat manajemen modern. NPM juga dilihat sebagai privatisasi terhadap fungsi-fungsi pemerintah dengan menggunakan pengetahuan dan pengalaman dari dunia manajemen bisnis untuk meningkatkan kinerja layanan publik dalam birokrasi modern.

Paradigma ketiga adalah paradigma ***New Public Services (NPS)***. Paradigma ini menekankan pada pelayanan publik yang berorientasi pada nilai-nilai demokrasi, etika, partisipasi publik, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam paradigma ini, pemerintah dianggap sebagai pelayan masyarakat yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan warga negara dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Paradigma NPS menganggap bahwa masyarakat sebagai warga negara bukan hanya seorang pelanggan yang dilayani sesuai dengan standar yang ada, melainkan sebagai pemilik

yang memiliki hal atas pelayanan tersebut. Dalam paradigma ini, administrator harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi.

Paradigma terakhir yaitu ***governance***, dimana paradigma ini dijadikan fokus dalam penelitian ini. Perkembangan dalam dunia administrasi public terus berkembang dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan kehidupan manusia. Perubahan nampak jelas pada bagaimana cara pemerintah menyelenggarakan administrasi publik, khususnya ketika tanggung jawab pemerintah semakin bertambah dan lingkup kekuasaannya semakin luas. Administrasi publik memperhatikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Konsep tata kelola pemerintahan yang baik dilaksanakan dalam bentuk system pemerintahan yang demokratis, dimana pusat kekuasaan tidak berpusat kepada pemerintah saja, tetapi juga terdapat partisipasi aktif dari rakyat. Penyelenggaraan ini mencakup interaksi tiga entitas, yaitu rakyat, pengusaha, dan pemerintah.

Aspek-aspek *governance* meliputi kelembagaan, proses, dan nilai-nilai. Kelembagaan merujuk pada struktur organisasi dan institusi yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Proses *governance* meliputi serangkaian langkah atau tahapan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan kebijakan yang

transparan, inklusif, dan akuntabel. Nilai-nilai *governance* meliputi integritas, keadilan, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan keberlanjutan yang menjadi landasan untuk memastikan keputusan maupun tindakan yang diambil tepat dengan kepentingan publik. Kesatuan dari kelembagaan, proses, dan nilai-nilai dari *governance* membentuk kerangka kerja yang kuat untuk pengelolaan yang baik dan berkelanjutan dari suatu organisasi, menciptakan lingkungan organisasi yang stabil, transparan, dan berorientasi pada pelayanan yang menguntungkan bagi semua pemangku kepentingan.

Berdasarkan pada paradigma *governance*, peneliti menggunakan aspek proses pada tata kelola *governance* yang terfokus pada dinamika kolaborasi. Penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana dinamika kolaborasi yang terjadi pada program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) dalam penurunan prevalensi stunting di Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen.

1.5.5 Collaborative Governance

Collaborative Governance adalah suatu sistem pengaturan yang melibatkan satu atau lebih lembaga publik dalam proses pengambilan keputusan. Dalam pendekatan ini, lembaga-lembaga tersebut secara aktif melibatkan pemangku kepentingan non-negara. Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah, yang memungkinkan partisipasi berbagai pihak. Dengan melibatkan pemangku kepentingan yang beragam, *Collaborative Governance* bertujuan untuk menciptakan keputusan yang

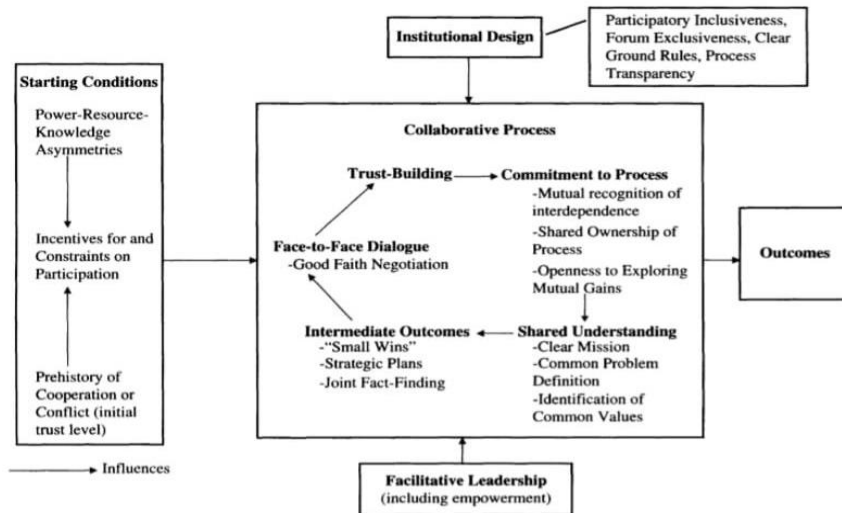
lebih inklusif dan responsif. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan masyarakat dalam mencapai hasil yang lebih baik (Ansell dan Gash, 2008).

Selain itu, O'Leary dan Bingham, seperti yang dikutip oleh Sudarmo (2015), menjelaskan bahwa kolaborasi adalah suatu konsep yang mencerminkan proses fasilitasi dan pelaksanaan yang melibatkan berbagai organisasi. Proses ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang sulit diatasi oleh satu organisasi secara mandiri. Dengan demikian, kolaborasi menjadi penting dalam menangani isu-isu kompleks yang memerlukan kerjasama antar berbagai pihak. Dengan demikian, kolaborasi menjadi penting dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan memerlukan kerjasama lintas organisasi.

Edward DeSeve, seperti yang dikutip oleh Sudarto (2015), memberikan definisi mengenai tata kelola kolaboratif sebagai sebuah sistem yang terintegrasi, di mana hubungan-hubungan yang terjalin dikelola secara efektif melintasi batas-batas organisasi, baik yang bersifat formal maupun informal. Dalam konteks ini, tata kelola kolaboratif tidak hanya mencakup interaksi antar lembaga pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai pihak lain, termasuk sektor swasta, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip-prinsip organisasi yang diterapkan dalam tata kelola kolaboratif ini sering kali direkonsepsi untuk menyesuaikan dengan dinamika dan kompleksitas yang ada dalam lingkungan sosial dan politik saat ini.

Selain itu, DeSeve menekankan pentingnya adanya definisi yang jelas mengenai kesuksesan dalam konteks kolaborasi ini, sehingga semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan yang ingin dicapai. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan, aktor publik, yaitu pemerintah, dan aktor swasta, seperti organisasi bisnis atau perusahaan, tidak beroperasi secara terpisah. Sebaliknya, mereka berkolaborasi untuk mencapai kepentingan masyarakat.

Terdapat berbagai model collaborative governance yang sering dijadikan referensi dalam penelitian, salah satunya adalah model yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash pada tahun 2008. Mereka mengidentifikasi empat variabel kunci yang mempengaruhi collaborative governance, yaitu: (1) kondisi awal, (2) desain kelembagaan, (3) kepemimpinan, dan (4) proses kolaboratif. Pemahaman terhadap variabel-variabel ini sangat penting untuk menganalisis efektivitas kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan.



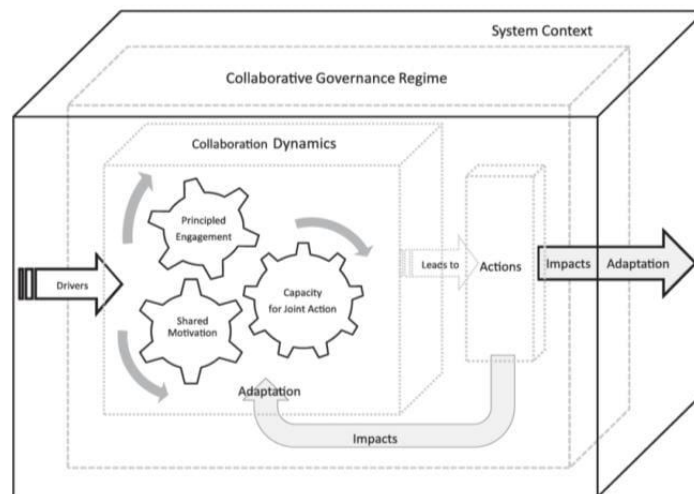
Gambar 1.3 Model *Collaborative Governance* Ansell dan Gash (2008)

Sumber : (Ansell & Gash, 2008)

Pada awal dari model ini yaitu kondisi awal. Pada tahap ini akan mengkaji mengenai kondisi ketidakseimbangan antara pengaruh atau kekuatan, sumber daya, pengetahuan pemangku kepentingan, track record kerjasama dari para pihak yang berkepentingan, dan konflik yang pernah terjadi antara para pemangku kepentingan. Pada tahap Desain Kelembagaan, ditetapkan aturan dasar yang menjadi landasan untuk berkolaborasi, yang berfungsi sebagai legitimasi prosedural dalam proses tersebut. Fokus utama pada tahap ini adalah menetapkan aturan partisipasi dalam kolaborasi, termasuk bagaimana forum akan dibentuk. Selain itu, penting untuk memiliki regulasi yang jelas dan memastikan transparansi dalam seluruh proses kolaborasi. Tahap selanjutnya kepemimpinan, dimana kolaborasi sangat dipengaruhi oleh peran pemimpin. Kepemimpinan yang kuat maka diyakini akan memberi peluang sebuah kolaborasi akan berhasil. Tahap terakhir yaitu Proses Kolaboratif yang terdiri dari: (1) Dialog tatap

muka; (2) Membangun kepercayaan; (3) Komitmen pada proses; (4) Pemahaman bersama, dan (5) Hasil sementara.

Model *collaborative governance* lainnya disampaikan oleh Emerson et al., dalam (Astuti et al, 2020), menjelaskan bahwa proses kolaborasi terdiri dari: (1) dinamika kolaborasi, (2) tindakan kolaborasi, serta (3) dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi.



Gambar 1.4 Kerangka Kerja Integratif untuk *Collaborative Governance*
Sumber: Emerson, Nabatchi, dan Balogh dalam (Astuti et al, 2020)

Di dalam proses kolaborasi, dinamika kolaborasi akan membahas mengenai penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas melakukan tindakan bersama. Penggerakan prinsip bersama terdapat beberapa komponen yang dilihat, yaitu pengungkapan, deliberasi, dan teterminasi. Motivasi bersama di dalamnya terdapat komponen, yaitu kepercayaan bersama, pemahaman bersama, dan legitimasi internal. Kapasitas melakukan tindakan bersama terdapat beberapa komponen yang

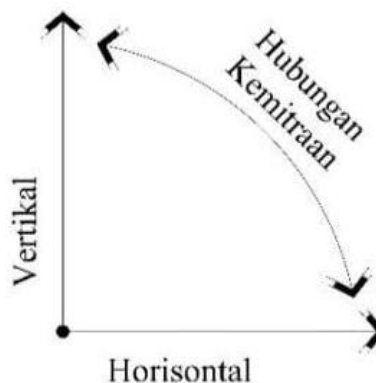
dilihat yaitu prosedur dan kesepakatan bersama, kepemimpinan kolaborasi, pengetahuan, dan sumber daya

Tahap berikutnya dalam kolaborasi adalah tindakan yang mencakup berbagai kegiatan, acara, atau diskusi yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat. Kualitas dari tindakan ini dapat dievaluasi berdasarkan sejauh mana pembangunan dan pemahaman yang benar mengenai dinamika kolaborasi diperoleh oleh para aktor dan individu yang terlibat. Selain itu, hasil dari tindakan kolaboratif ini akan memberikan dampak yang bersifat sementara, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kembali dinamika kolaborasi yang ada. Dampak tersebut juga dapat berlanjut menjadi efek jangka panjang yang lebih signifikan. Dengan demikian, penting untuk memperhatikan bagaimana setiap tindakan kolaboratif dapat memengaruhi proses dan hasil kolaborasi secara keseluruhan.

Model *Collaborative Governance* selanjutnya disampaikan oleh Edward P. Weber, Nicholas P. Lovrich, dan Michael Gaffney (2005) dalam (Astuti et al, 2020). Model ini mengemukakan bahwa terdapat integrasi yang menekankan pada fungsi, ketika suatu kolaborasi dilakukan. Integrasi ini mencakup berbagai fungsi dalam birokrasi, melibatkan berbagai sektor kebijakan, serta mencakup berbagai tingkat pemerintahan. Selain itu, partisipasi masyarakat juga menjadi bagian penting dari proses ini. Masyarakat dan organisasi non-pemerintah berkontribusi dalam mencari solusi untuk masalah yang ada. Mereka tidak hanya terlibat dalam tahap perumusan, tetapi juga dalam pelaksanaan solusi tersebut. Dengan

demikian, kolaborasi antara semua pihak sangat penting untuk mencapai hasil yang efektif. (Weber dalam Astuti et al, 2020).

Ada tiga dimensi yang perlu diperhatikan dalam konteks ini. Dimensi pertama adalah dimensi vertikal, yang mencakup hubungan antara lembaga pemerintah dan lembaga lainnya, serta interaksi dengan warga negara dan organisasi non-pemerintah dalam struktur hubungan yang bersifat hierarkis. Dimensi kedua adalah dimensi horizontal, yang menggambarkan hubungan antara organisasi yang memiliki kedudukan setara. Sementara itu, dimensi ketiga adalah dimensi kemitraan, yang merupakan kombinasi dari dimensi vertikal dan horizontal, sehingga menciptakan pengaturan yang lebih efektif. Dengan memahami ketiga dimensi ini, kita dapat melihat bagaimana interaksi dan kolaborasi antara berbagai pihak dapat terjalin dengan baik.



Gambar 1.5 Model Kolaborasi Weber, Lovrich, dan Gaffney
Sumber: Weber, Lovrich, dan Gaffney dalam (Astuti et al, 2020)

Teori berikutnya yang diungkapkan oleh Daniel Seigler menyatakan bahwa Ada delapan prinsip utama yang harus diperhatikan dalam penerapan tata kelola kolaboratif. Pertama, masyarakat harus dilibatkan secara aktif

dalam proses produksi barang publik. Kedua, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk menggerakkan sumber daya dan aset guna menyelesaikan masalah publik. Ketiga, keterlibatan tenaga profesional sangat penting untuk memberdayakan masyarakat. Keempat, pengambilan keputusan sebaiknya dilakukan melalui musyawarah. Selain itu, kebijakan yang diambil harus mencakup kemitraan kolaboratif yang berkelanjutan, bersifat strategis, dan mampu mengubah struktur kelembagaan untuk memberdayakan masyarakat serta menyelesaikan masalah publik. Terakhir, aspek akuntabilitas juga harus menjadi bagian integral dari kebijakan tersebut. (Seigler, dalam (Qomariah, 2023).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model *collaborative governance* yang disampaikan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) yang terfokus pada aspek dinamika kolaborasi. Dimana di dalamnya membahas mengenai penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas melakukan tindakan bersama. Penggunaan teori dinamika kolaboratif ini karena program DASHAT sudah berjalan dan terdapat kolaborasi antar aktor di dalamnya, sehingga dengan menggunakan teori dinamika kolaboratif maka peneliti dapat melihat bagaimana pelaksanaan kolaborasi antar aktor dalam program tersebut.

1.5.6 Dinamika Kolaborasi

Dinamika kolaboratif menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) merupakan bagian paling penting dalam proses kolaborasi. Pengungkapan seberapa baik pelaksanaan kolaborasi terdapat pada

dinamika yang terdapat dalam pergerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas melakukan Tindakan bersama.

A. Penggerakan Prinsip Bersama bertujuan untuk menyatukan nilai-nilai inti yang mendasari kolaborasi. Proses ini dapat dilakukan melalui dialog langsung atau dengan memanfaatkan teknologi sebagai perantara. Pada tahap ini, penting untuk menegaskan kembali tujuan yang ingin dicapai serta membentuk dan mengembangkan prinsip-prinsip bersama, yang sering kali diungkapkan dari berbagai sudut pandang para aktor yang terlibat.

- 1) Pengungkapan adalah suatu proses yang penting dalam konteks kolaborasi. Proses ini melibatkan pengungkapan kepentingan dan nilai-nilai yang dimiliki oleh berbagai aktor yang terlibat. Dengan mengungkapkan kepentingan tersebut, para pihak dapat memahami perspektif satu sama lain. Selain itu, pengungkapan juga berfungsi untuk membangun kesamaan kepentingan di antara aktor-aktor tersebut. Upaya ini sangat krusial untuk menciptakan sinergi dalam kolaborasi. Melalui pengungkapan, diharapkan tercipta ruang dialog yang konstruktif. Dengan demikian, pengungkapan berkontribusi pada penguatan hubungan dan kerjasama yang lebih efektif.
- 2) Deliberasi, terbentuk melalui proses diskusi yang dilakukan secara kolektif. Semua aktor yang terlibat mengungkapkan bahwa diskusi tersebut berlangsung dalam suasana yang terbuka. Hal ini menunjukkan adanya dorongan bagi setiap individu untuk

menyampaikan pendapat mereka. Keterbukaan ini dapat diamati dari presentasi yang dilakukan oleh masing-masing aktor mengenai hasil pencapaian kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, deliberasi menjadi sarana penting untuk memfasilitasi pertukaran ide dan informasi di antara para peserta.

- 3) Determinasi dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan secara kolektif untuk menetapkan tujuan dalam suatu kolaborasi. Proses ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu determinasi primer dan determinasi substantif. Determinasi primer berfokus pada pengambilan keputusan yang bersifat prosedural dan teknis. Di sisi lain, determinasi substantif berkaitan dengan pembentukan kesepakatan bersama yang mencakup rekomendasi untuk langkah-langkah kolaborasi di masa depan. Dengan demikian, kedua jenis determinasi ini sangat penting dalam memastikan keberhasilan kolaborasi yang dilakukan.

B. Motivasi Bersama, merupakan penguatan siklus yang terdiri dari elemen kepercayaan bersama, pemahaman bersama, legitimasi internal, dan komitmen.

- 1) Kepercayaan bersama dapat dipahami melalui adanya hubungan saling tergantung yang terjalin antara para aktor, di mana mereka saling membutuhkan satu sama lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, interaksi yang terjadi di luar konteks kolaborasi juga memainkan peran penting dalam membangun

kepercayaan, karena hubungan yang terjalin di luar lingkungan formal dapat memperkuat ikatan antar individu. Pengalaman sebelumnya dalam berkolaborasi juga berkontribusi pada pengembangan kepercayaan ini, karena pengalaman positif dapat menciptakan keyakinan bahwa kolaborasi yang akan datang akan berjalan dengan baik. Terakhir, hubungan personal yang terjalin antara individu-individu yang terlibat dalam kolaborasi juga sangat berpengaruh, karena kedekatan emosional dan saling pengertian dapat meningkatkan rasa saling percaya di antara mereka.

- 2) Pemahaman bersama adalah kondisi di mana para aktor saling mengenali dan menghargai perbedaan yang ada di antara mereka. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung kolaborasi. Proses untuk mencapai pemahaman bersama sering kali dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan yang telah terbangun di antara para pihak. Ketika kepercayaan tersebut kuat, para aktor cenderung lebih terbuka dalam berbagi pandangan dan perspektif mereka. Keberadaan kepercayaan ini memfasilitasi dialog yang lebih konstruktif. Dengan demikian, pemahaman bersama dapat memperkuat kerjasama dan kolaborasi yang efektif. Pada akhirnya, hal ini berkontribusi pada pencapaian tujuan bersama dalam konteks tata kelola kolaboratif.
- 3) Legitimasi internal merujuk pada pengakuan yang diberikan oleh para anggota dalam suatu kolaborasi bahwa aktor-aktor yang terlibat

memiliki tingkat kepercayaan dan kredibilitas yang tinggi dalam melaksanakan tugas serta peran mereka masing-masing. Pengakuan ini sangat penting karena menciptakan rasa saling menghormati dan keyakinan di antara para aktor, yang pada gilirannya dapat meningkatkan komitmen mereka terhadap tujuan bersama.

C. Kapasitas untuk melakukan tindakan bersama mencakup hasil yang diperoleh dari berbagai elemen lintas fungsional. Hal ini memungkinkan terciptanya tindakan yang efektif karena adanya kemampuan yang memadai dari para aktor yang terlibat. Dengan kata lain, kolaborasi yang sukses bergantung pada sinergi antara berbagai elemen yang berkontribusi. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas individu dan kelompok sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam konteks kolaboratif.

1) Prosedur dan kesepakatan bersama mencakup berbagai aturan umum, protokol kegiatan, serta pedoman yang mengatur proses pengambilan keputusan, yang semuanya dapat diimplementasikan melalui kesepakatan yang bersifat baik informal maupun formal. Dalam konteks kolaborasi yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, sangat penting untuk memiliki landasan hukum yang jelas untuk mendukung dan mengatur hubungan antar pihak yang terlibat. Dengan adanya landasan hukum tersebut, kolaborasi dapat berjalan dengan lebih terstruktur dan terjamin, sehingga setiap aktor

memiliki pemahaman yang sama mengenai hak dan kewajiban mereka dalam kerangka kerja sama yang telah disepakati.

- 2) Kepemimpinan memainkan peran penting dalam mengumpulkan dukungan yang diperlukan untuk menjalankan kolaborasi yang efektif. Selain itu, pemimpin juga bertanggung jawab untuk menginisiasi pertemuan yang memungkinkan para aktor berinteraksi dan berdiskusi. Mereka berfungsi sebagai fasilitator dan mediator, yang membantu menyelesaikan konflik dan memastikan bahwa semua suara didengar dalam proses kolaborasi. Di samping itu, pemimpin juga bertindak sebagai representasi dari para aktor dan kolaborasi secara keseluruhan, sehingga dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan kelompok. Terakhir, mereka berperan dalam mendistribusikan pengetahuan, mendorong penggunaan teknologi yang relevan, serta melakukan advokasi publik untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap inisiatif kolaboratif yang sedang dijalankan.
- 3) Pengetahuan umumnya dibagikan selama setiap pertemuan yang diadakan secara bersama-sama, di mana para aktor menyampaikan hasil-hasil pencapaian mereka masing-masing. Selama pertemuan tersebut, terdapat kesempatan untuk berdiskusi mengenai capaian yang telah disampaikan, sehingga semua pihak dapat saling memberikan masukan. Proses diskusi ini sangat penting karena memungkinkan para aktor untuk berkolaborasi dalam menganalisis

informasi yang ada. Setelah diskusi, dilakukan pula pembuatan keputusan secara kolektif yang melibatkan semua aktor yang hadir. Dengan demikian, setiap pertemuan tidak hanya menjadi ajang berbagi pengetahuan, tetapi juga sebagai platform untuk merumuskan langkah-langkah selanjutnya secara bersama.

- 4) Sumber daya mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pendanaan dalam bentuk materi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan. Selain itu, sumber daya juga melibatkan pembagian waktu dan peran di antara para aktor yang terlibat dalam kolaborasi. Dukungan teknis dan administratif sangat penting untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar dan efisien. Selain itu, keberadaan implementor di lapangan menjadi krusial untuk menerapkan rencana yang telah disusun. Terakhir, kebutuhan akan keahlian tertentu juga harus dipenuhi agar kolaborasi dapat mencapai hasil yang optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

1.5.7 Faktor Pendorong dan Penghambat Dinamika Kolaboratif

Dinamika kolaboratif dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat. Mattessich dan Monsey, seperti yang dikutip oleh Warsono dan rekan-rekan (2020), mengidentifikasi 19 faktor yang berkontribusi pada keberhasilan suatu kolaborasi. Faktor-faktor ini dikelompokkan ke dalam enam kategori utama. Kategori tersebut meliputi: 1) lingkungan, 2)

keanggotaan, 3) proses/struktur, 4) komunikasi, 5) tujuan, dan 6) sumber daya.

1. Lingkungan

- Sejarah adanya kolaborasi
- Pemimpin kolaboratif
- Iklim politik/social

2. Keanggotaan

- Saling menghormati
- Hanya anggota yang sesuai
- Kepentingan pribadi
- Kemampuan berkompromi

3. Proses/Struktur

- Kepemilikan Bersama
- Pengambilan keputusan pada berbagai tingkatan
- Fleksibilitas
- Pengembangan aturan yang jelas dan pedoman kebijakan

4. Komunikasi

- Terbuka dan frekuensi komunikasi
- Membangun tautan komunikasi formal dan informal

5. Tujuan

- Tujuan dan sasaran yang nyata dan dapat dicapai
- Visi Bersama
- Tujuan yang unik

6. Sumber Daya

- Dana yang cukup
- Tenaga terampil yang disatukan

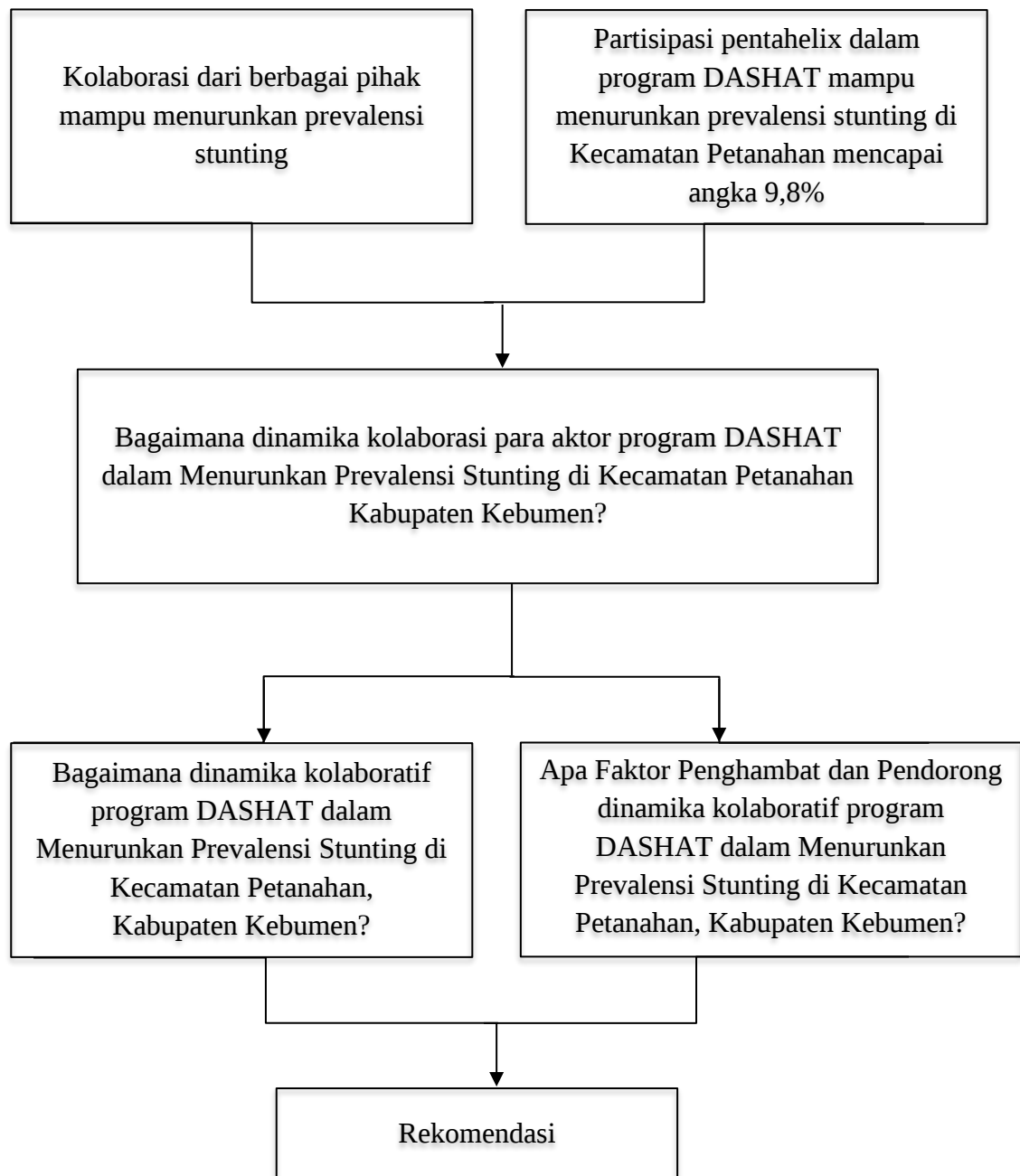
Menurut Government of Canada (dalam Warsono, H et al., 2020) terhambatnya kolaborasi maupun partisipasi adalah disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: (1) faktor budaya; (2) faktor institusi; dan (3) faktor politik. Faktor-faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Faktor Budaya : Kolaborasi sering kali menghadapi tantangan yang dapat mengakibatkan kegagalan. Salah satu penyebabnya adalah budaya yang terlalu bergantung pada prosedur yang ada. Selain itu, kurangnya keberanian untuk mengambil resiko, mempertahankan konsep top down oleh pemerintah, dan partisipasi kelompok kepentingan tidak merata dan didominasi oleh pihak pemerintah juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas kolaborasi.
2. Faktor Institusi : Kolaborasi dapat gagal jika terdapat penerapan struktur hierarkis yang kaku di antara institusi yang terlibat. Ketika institusi publik beroperasi dengan akuntabilitas yang terlalu rigid, hal ini dapat menghambat fleksibilitas yang diperlukan untuk berkolaborasi secara efektif. Struktur yang hierarkis sering kali menghalangi komunikasi yang terbuka dan partisipasi aktif dari semua pihak. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih adaptif dan responsif agar kolaborasi dapat berjalan dengan baik..

3. Faktor Politik : Kolaborasi sering kali menghadapi tantangan akibat minimnya inovasi dari para pemimpin dalam mengatasi tujuan politik yang kompleks dan sering kali bertentangan. Selain itu, perubahan dalam kesepakatan yang telah dibuat dan perbedaan kepentingan di antara pemangku kepentingan juga dapat menjadi penghalang. Ketidakcocokan ini dapat mengganggu proses kolaboratif dan mengurangi efektivitasnya. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin untuk mengembangkan pendekatan yang lebih kreatif dan adaptif dalam menghadapi dinamika yang ada.

1.6 Kerangka Pikir

Secara sistematis, kerangka teori dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.6 Kerangka Pikir

1.7 Fenomena Penelitian

Fokus Penelitian	Fenomena	Sub Fenomena
Dinamika Kolaboratif	Penggerakan	1. Pengungkapan
	Prinsip Bersama	2. Deliberasi 3. Determinasi
	Motivasi Bersama	1. Kepercayaan Bersama 2. Pemahaman Bersama 3. Legitimasi Internal
	Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama	1. Prosedur dan Kesepakatan Bersama 2. Kepemimpinan 3. Pengetahuan 4. Sumber Daya
Faktor Pendorong	Faktor Budaya	1. Partisipasi kelompok kepentingan 2. Budaya ketergantungan pada prosedur
Dinamika Kolaborasi	Faktor Institusi	1. Penerapan struktur hierarkis terhadap institusi yang terlibat 2. Akuntabilitas institusi publik
	Faktor Sumber Daya	1. Tenaga terampil yang disatukan
	Faktor Lingkungan	1. Latar belakang adanya kolaborasi 2. Kesadaran masyarakat

1.8 Argumen Penelitian

Penelitian ini atas dasar adanya tuntutan untuk pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) point ke-2 yaitu “Tanpa Kelaparan”. Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah menghilangkan semua bentuk kekurangan gizi pada tahun 2030. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang memadai terhadap nutrisi yang diperlukan. Permasalahan stunting di Indonesia menjadi salah satu urgensi pemerintah dalam bidang kesehatan. Guna memperlancar keberjalanan program maka diadakan kolaborasi dengan beberapa pihak dengan kepentingan dan kesadaran yang sama akan urgensi dari penanganan stunting itu sendiri.

Collaborative Governance menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. *Collaborative Governance* menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh dapat dianalisis melalui dinamika kolaborasinya. Konsep dinamika kolaborasi menurut Emerson dalam (Astuti, et al., 2020) meliputi penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas melakukan tindakan bersama. Ketika ketiga aspek tersebut dapat berjalan dengan lancar maka tujuan kolaborasi akan dapat tercapai dengan maksimal. Dalam keberjalanan proses *collaborative governance* juga terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat. Menurut Government of Canada (dalam Warsono, H et al., 2020) terhambatnya kolaborasi maupun partisipasi adalah disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: (1) faktor budaya; (2) faktor institusi; dan (3) faktor politik. Sedangkan Menurut Mattessich dan Monsey (dalam Warsono, H et al.,

2020) faktor keberhasilan sebuah kolaborasi dapat dilihat dari 1) lingkungan; 2) keanggotaan; dan 3) sumber daya. Sehingga peneliti akan menganalisis bagaimana pelaksanaan kolaborasi dengan beberapa indikator serta menganalisis faktor penghambat dan faktor pendorong dari kolaborasi yang ada untuk dapat dimaksimalkan dalam program penanganan stunting.

Kolaborasi dalam setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah sangat diperlukan untuk meningkatkan peluang keberhasilan suatu program dilaksanakan. Khususnya pada kasus stunting yang menjadi urgensi Indonesia bahkan dunia saat ini. Kabupaten Kebumen termasuk kabupaten yang memiliki angka stunting yang masih tinggi dibandingkan kabupaten lain di Jawa Tengah. Walaupun pada 2023 angka stunting sudah mencapai target nasional, akan tetapi tetap melakukan konsistensi pelaksanaan program maupun kebijakan tentang pencegahan dan penanganan stunting agar hasilnya lebih maksimal. Salah satu program yang dijalankan oleh Kabupaten Kebumen yaitu program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT). Kecamatan Petanahan menjadi salah satu kecamatan yang berhasil menekan angka prevalensi stunting di bawah rata-rata angka stunting di Kabupaten Kebumen, hal tersebut menunjukkan adanya keberhasilan dari program yang dilakukan. Desa Ampelsari menjadi Kampung Keluarga Berencana (KB) sehingga dijadikan pilot project pelaksanaan program DASHAT di Kabupaten Kebumen, sehingga penelitian ini akan terfokus pada pelaksanaan kolaborasi di Desa Ampelsari, Kecamatan Petanahan. Oleh karena itu peneliti akan menganalisis bagaimana dinamika kolaborasi dalam Program Dapur Sehat Atasi Stunting

(DASHAT) dalam menurunkan prevalensi stunting di Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif. Kirk & Miller, seperti yang dikutip dalam Abdussamad, Z. (2021), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu tradisi dalam ilmu sosial yang secara mendasar mengandalkan pengamatan terhadap individu dalam konteks kehidupan mereka. Pendekatan ini berfokus pada interaksi dengan orang-orang tersebut, menggunakan bahasa dan istilah yang mereka pahami. Dengan demikian, penelitian kualitatif memberikan wawasan yang mendalam tentang pengalaman dan perspektif manusia dalam lingkungan mereka sendiri. Data yang terkumpul dianalisis secara empiris, berdasarkan fakta yang terjadi dalam proses sosial yang terkait dengan dinamika kolaboratif dalam program penurunan stunting. Melalui analisis data deskriptif, penelitian ini akan menghasilkan informasi berupa uraian, gambaran, dan catatan tentang keadaan yang ada di lapangan terkait dengan dinamika kolaboratif pelaksanaan kebijakan dalam pencegahan dan penanggulangan stunting. Dengan demikian, melalui penelitian ini dapat menganalisis dinamika kolaboratif program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), serta mengidentifikasi faktor pendorong dinamika kolaborasi dalam Program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT).

1.9.2 Situs Penelitian

Lokus penelitian merujuk pada suatu lokasi dimana penelitian dilakukan. Lokus penelitian yang dipilih oleh peneliti berada di Desa Ampelsari, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Pemilihan lokus tersebut didasarkan pada angka stunting di Kecamatan Petanahan yang tergolong rendah karena berada di bawah angka rata-rata prevalensi stunting Kabupaten Kebumen, serta Desa Ampelsari yang dijadikan *pilot project* pelaksanaan program DASHAT. Sementara itu, fokus penelitiannya yaitu :

- 1) Menganalisis dinamika kolaborasi dalam Program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Desa Ampelsari, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen.
- 2) Menganalisis faktor pendorong dinamika kolaborasi dalam Program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Desa Ampelsari, Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam hal ini adalah individu atau kelompok yang menyajikan data tentang fenomena atau studi kasus yang sedang diteliti oleh peneliti. Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sumber data kepada orang yang paham mengenai topik penelitian. Peneliti melibatkan sejumlah informan yang berperan dalam kolaborasi dalam program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kabupaten Kebumen dengan informan utama Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen dan Petugas Lapangan

Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Petanahan serta menggunakan teknik *snowball sampling* untuk memperoleh informan lain. Teknik *snowball sampling* melibatkan pengambilan sampel dengan bantuan informan kunci, yang kemudian akan mengembangkan sampel berdasarkan arahan yang diberikan oleh informan utama. Hal ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif atau *naturalistic* yaitu mengarah pada pengumpulan data yang terjadi secara alamiah melalui observasi.

Penentuan subjek penelitian ini harus relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga penelitian ini melibatkan subjek yang terkait dengan isu kolaborasi sesuai dengan fokus penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu :

- a) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kebumen
- b) Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan
Petanahan
- c) Pemerintah Kecamatan Petanahan
- d) Ahli Gizi Puskesmas Petanahan
- e) Pemerintah Desa Ampelsari
- f) Bidan Desa Ampelsari
- g) Kader Posyandu / Tim DASHAT Desa Ampelsari
- h) Masyarakat sasaran

1.9.4 Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan istilah yang digunakan dalam penelitian

kualitatif untuk kajian yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan data kualitatif maka penulis dapat menyusun secara kategoris berdasarkan atribut dan sifat dari fenomena yang diteliti. Data kualitatif penelitian ini berupa data yang berbentuk kata atau kalimat dari hasil wawancara secara mendalam kepada narasumber penelitian ini., observasi langsung di lapangan, serta dokumentasi berupa gambar. atau gambar.

1.9.5 Sumber Data

Dalam penelitian mengenai dinamika kolaborasi dalam Program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen menggunakan sumber data :

- 1) Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Contoh data primer mencakup informasi yang didapat melalui wawancara langsung antara peneliti dan informan. Dalam penelitian ini, data primer terdiri dari hasil wawancara peneliti dengan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Petanahan, Kader Posyandu atau Tim DASHAT Desa Ampelsari, Ahli Gizi Puskesmas Petanahan, Bidan Desa Ampelsari, Pemerintah kecamatan dan desa, serta masyarakat sasaran.
- 2) Data sekunder adalah informasi yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur yang relevan dengan isu yang sedang diteliti, termasuk media massa seperti surat kabar dan internet, serta studi pustaka dan artikel.

Sumber-sumber lain yang dapat mendukung topik penelitian juga turut digunakan untuk mengumpulkan data sekunder ini.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Terkait tahapan ini, terdapat sejumlah upaya memperoleh data yang dilakukan oleh peneliti, yaitu :

1) Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan informan. Diperlukan penggunaan teknik wawancara untuk menggali sedalam-dalamnya mengenai informasi terkait dengan dinamika kolaborasi dalam program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Desa Ampelsari, Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tipe wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan prosedur sistematis guna menggali informasi mengenai responden dengan memanfaatkan urutan pertanyaan secara terstandar atau berurutan sebelum mengumpulkan informasi yang relevan terhadap subjek penelitian.

2) Pengamatan atau Observasi

Observasi berkaitan dengan bagaimana pengumpulan informasi yang dilakukan penulis berdasarkan atas pengamatan peneliti melalui panca indera terhadap situasi dan fenomena disekitar lokus penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi dengan tipe *participant observation* yaitu penulis akan terjun langsung dalam

melakukan pengamatan mengenai dinamika kolaborasi dalam program DASHAT.

3) Dokumen

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif yang melibatkan analisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau pihak lain terkait subjek tersebut (Herdiansyah, 2011). Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai data, termasuk gambar, dokumen resmi, dan informasi resmi yang berkaitan dengan dinamika kolaborasi dalam program DASHAT.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam penelitian kualitatif, diperlukan beberapa tahapan analisis data secara akurat. Menurut (Sugiyono, 2015) terdapat tahapan analisis data, yaitu :

1) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Dalam proses penelitian, peneliti sering kali dihadapkan pada data yang kompleks dan beragam, sehingga diperlukan analisis yang cermat untuk mengelola informasi tersebut melalui proses reduksi data. Reduksi data merupakan langkah penting yang melibatkan merangkum informasi, memilih elemen-elemen kunci, serta memfokuskan perhatian pada aspek-aspek yang paling relevan, sambil mencari tema dan pola yang muncul dari data yang ada (Sugiyono, 2009). Dengan melakukan reduksi data, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai informasi yang telah dikumpulkan, yang pada gilirannya akan memudahkan mereka dalam melanjutkan tahap penelitian berikutnya dan mencari informasi tambahan

jika diperlukan. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menyaring dan merangkum data pokok yang signifikan, serta mengkategorikannya berdasarkan kriteria tertentu, seperti huruf besar, huruf kecil, dan angka. Dengan demikian, reduksi data tidak hanya membantu dalam menyederhanakan informasi, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas penelitian secara keseluruhan.

2) *Data Display* (Penyajian Data)

Informasi yang telah terkumpul selama proses penelitian membuka peluang bagi peneliti untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan yang tepat berdasarkan data yang ada. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015), salah satu cara yang paling umum digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah melalui teks naratif. Penyajian data dalam bentuk naratif ini sangat membantu peneliti dalam memahami konteks dan dinamika yang terjadi, sehingga mereka dapat merencanakan langkah-langkah selanjutnya dengan lebih baik berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh. Dengan menggunakan pendekatan naratif, peneliti dapat menggambarkan temuan mereka secara lebih mendalam dan komprehensif, yang memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi pola-pola penting dan hubungan antar variabel

3) Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merujuk pada penemuan baru yang belum pernah diungkapkan sebelumnya. Temuan ini dapat berupa deskripsi atau gambaran yang lebih jelas mengenai suatu objek yang telah

diteliti. Selain itu, kesimpulan juga dapat mencakup hubungan kausal dan interaktif yang teridentifikasi selama proses penelitian. Di samping itu, hasil penelitian dapat menghasilkan hipotesis atau teori yang dapat digunakan untuk memahami fenomena yang diteliti lebih dalam. (Sugiyono, 2009).

1.9.8 Kualitas Data

Peneliti menggunakan teknik triangulasi guna menguji kualitas data yang diperoleh agar menjadi valid. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan informasi handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu. Tahap ini melibatkan perbandingan dan pengecekan berulang dari berbagai sumber untuk memastikan keakuratan informasi yang diperoleh. Triangulasi sumber berpacu pada upaya untuk mendapatkan data dari berbagai sumber berbeda dengan teknik yang sama. Dari kegiatan triangulasi data ini, penulis dapat menilai apakah jawaban tersebut mendapat respon yang serupa dengan sumber yang berbeda.